

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi.(1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Edwar III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Nugroho Rian.(2014). *Kebijakan Publik dinegara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Salim, Agus.(2005). *Teori Paradigm*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sugiyono.(2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Suharno.(2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Sutrisno, Edy.(2009). *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Syafiie Inu Kencana.(2013). *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Winarno Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Skripsi

- Ahmad Rosandi Sakir (2017). *Analisis implementasi kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan structural di pemerintahan bone*
- Arum Mustika Wati (2014). *Pelaksanaan administrasi kepegawaian pada badan kepegawaian daerah(BKD) daerah istimewah Yogyakarta*
- Herlambang Adhi Nugroho (2014). *Pelaksanaan kewenangan kepala daerah dalam penentuan mutasi pegawai sipil dalam jabatan structural dilingkungan pemerintahan kabupaten boyolali*

Jurnal

- Adia ferizko.(2013). Pelaksanaan kewenangan kepala daerah dalam penentuan mutasi pegawai negeri sipil dalam jabatan structural. Pekanbaru.
- Alem.(2018). Kinerja badan kepegawaian daerah kabupaten bantul dalam pengembangan aparatur sipil Negara tahun 2016
- Candra pradipta.(2016). Implementasi kebijakan system kenaikan pangkat tanpa berkas di kepegawaian daerah provinsi Jawa Tengah
- Harun arsyad, sukanto. (2014). Modul diklat analisis kepegawaian, kewenanganpengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS. Jakarta
- Herlambang adhi nugroho.(2014). Pelaksanaan kewenangan kepala daerah dalam penentuan mutasi pegawai negeri sipil dalam jabatan structural di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali
- Monika.(2017). Implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Negara terhadap pelaksanaan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilukada di kotaYogyakarta
- Nelson bastian nope.(2014). Mutasi pejabat fungsional ke dalam jabatan structural di era otonomi Daerah
- Nindry septya pranita, siti rohchmah, sukanto.(2011). Inovasi administrasi kepegawaian dengan system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dalam mewujudkan good governance
- Nurainun mangunsong, Mansur.(2014). Pemberhentian pegawai negeri sipil ditinjau dari dari undang-undang nomor 43 tahun 1999 perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokokkepegawaian. Yogyakarta
- Siti baiti.(2018). Pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara di kota Yogyakarta
- Taufik rahman.(2017). Kinerja aparatur sipil Negara dalam pelayanan public
- Wildan Lutfi A, Mayahayati K.(2013). Implementasi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai khususnya aspek jam kerja di kabupaten kutai kartanegara